



Urgensi Menghidupkan (Kembali) Siskamling

Oleh: **Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)**

SURAT Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal (3/9/2025) tentang peningkatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk Kondusivitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di daerah, bukan produk hukum yang mengikat.

Maka Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakannya. Sehingga kehadiran pejabat dan staf Kemendagri

■ Bersambung ke Hal 7

RUU Perampasan Aset Jalan Panjang Mewujudkan Efek Jera Koruptor

Oleh: **Farid Wajdi, Founder Ethics of Care/ Anggota Komisi Yudisial 2015-2020**

PEMBERANTASAN korupsi di negeri ini selalu berada dalam persimpangan: antara niat luhur yang diumbar di ruang publik dengan realitas politik dan hukum yang kerap penuh tikungan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali masuk panggung wacana. Komisi III DPR menyatakan siap membahas draf baru, sebuah pernyataan yang menimbulkan harapan sekaligus keraguan.

■ Bersambung ke Hal 7



PBNU Disinyalir Terima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji

Pengurus: Tak Ada Kaitan dengan Institusi



PT GAG Nikel Kembali Beroperasi di Raja Ampat

Jakarta, MIMBAR - Pemerintah pusat RI kembali memberikan restu operasional tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya kepada PT GAG Nikel. Sebelumnya operasi tambang itu sempat dihentikan sementara pada 5 Juni lalu buntut polemik kerusakan lingkungan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pemberian izin ke PT GAG Nikel telah melalui proses evaluasi antar lembaga mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Hasilnya, kata Tri, PT GAG telah memenuhi syarat PROPER untuk beroperasi. Menurut dia, PT GAG mengantongi PROPER Hijau yang berarti aman dalam aspek pengelolaan lingkungan dan masyarakat.

"Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pember-

■ Bersambung ke Hal 7

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana kasus kuota haji, termasuk ke PBNU.

KPK menjelaskan, penelusuran tersebut bukan berarti mendiskreditkan PBNU, melainkan sebatas menjalankan kewajiban untuk pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan

■ Bersambung ke Hal 7



Dirut Bulog Bantah Beras SPHP & Premium Langka



Jakarta, MIMBAR - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membantah isu kelangkaan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan beras premium di sejumlah ritel modern.

Rizal langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga ritel modern di bilangan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Ketiga ritel yang dicek olehnya, yakni Alfamart Radio Dalam 3, Indomaret Radio Dalam 2, serta

■ Bersambung ke Hal 7



Kecelakaan Maut Tewaskan 8 Orang

Surabaya, MIMBAR - Sebanyak delapan (8) orang karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember dikabarkan meninggal dunia saat bus yang ditumpangi mereka mengalami kecelakaan lalu lintas di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) sore.

Direktur RS Bina Sehat Faida membenarkan bahwa kecelakaan bus itu dialami rombongan karyawan RSBS yang liburan di Gunung Bromo.

■ Bersambung ke Hal 7

Jadwal Salat

15 RABIUL AWAL 1447 H

Imsak	: 04:52 WIB	Ashar	: 15:24 WIB
Subuh	: 05:02 WIB	Maghrib	: 18:27 WIB
Zuhur	: 12:23 WIB	Isya	: 19:36 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Reputasi Ormas Islam

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji kembali mencuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelusuri aliran dana dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan untuk menelusuri dugaan aliran dana, termasuk ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun, sebuah angka yang mengejutkan jika mengingat haji adalah ibadah sakral yang menjadi dambaan jutaan umat Islam.

Pernyataan KPK ini segera memantik reaksi publik. Sebagian

■ Bersambung ke Hal 7

Deliserdang: Jalan Berlubang, Anggaran Bocor

Oleh: **Ngatirin**

KITA perlu berterima kasih kepada Pemkab Deliserdang. Jalan-jalan yang rusak parah akhirnya mulai ditambal. Aspal baru sudah terhampar di beberapa titik, meski getir masih menyelinap di hati. Getir karena perbaikan itu dilakukan tanpa transparansi. Tidak ada papan informasi proyek. Padahal jelas, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

■ Bersambung ke Hal 7



■ Oknum ya ...
■ He..he..he..